

Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Kesehatan Di Kelurahan Cijawura

Kota Bandung

Oleh: Erni Maulani, Nadia Antika Suci, Ivan Hamdani, Sodikin, Rikki

Maulana Yusup

ernimaulani498@gmail.com, nadiaantikasuci123@gmail.com,

ivanhamedani83@gmail.com, sodikin.yasri209@gmail.com,

rikkiumbandung@gmail.com,

Abstrak

Dalam sebuah negara, peran pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat sangat penting karena menyangkut kepentingan umum, yang di antaranya dapat diimplemenasikan dalam suatu program pemberdayaan masyarakat. Salah satu peran pemerintah dalam memberikan layanan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan, di mana Pemerintah Kelurahan dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Sektor kesehatan menjadi sangat penting dalam kajian ini karena sejauh mana pemerintah kelurahan dapat menerapkan konsep pelayanan publik yang diimplementasikan ke dalam program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk mengetahui berjalan atau tidaknya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan. Hasilnya bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Cijawura sudah berjalan dengan efektif hal ini bisa diukur melalui beberapa tahapan dari tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Soekanto, 1987. Di antaranya adalah tahapan persiapan, tahapan pengkajian, tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahapan pemformalisasi rencana aksi, tahapan pelaksanaan "implementasi" program atau kegiatan, tahapan evaluasi, tahapan terminasi.

Kata kunci: *kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemerintah kelurahan*

Abstract

In a country, the role of the government in providing services to the community plays a very important role because it concerns the public interest, among which can be implemented in a community empowerment program. One of the roles of the government in providing such services is carried out by the Village Government, where the Village Government can use its authority to empower the community in the health sector. The Health Sector becomes very important in this study because of the extent to which the village government can apply the concept of public services implemented into community empowerment programs in the health sector. This research uses qualitative method with descriptive approach, to find out whether or not the implementation of community empowerment in the field of health services. The results of research that has been done that the implementation of community empowerment in Cijawura Village has been running effectively this can be measured through several stages of community empowerment according to Soekanto, 1987. Among them are the stages of preparation, stages of assessment, stages of alternative planning of programs or activities, stages of reforming the action plan, stages of implementation of "implementation" of programs or activities, evaluation stages, termination stages.

Keyword: *community empowerment, village government, health*

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Standar pelayanan publik merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Dengan adanya standar pelayanan publik tersebut maka dapat memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik itu dapat diketahui prosedur, pesyaratan, biaya serta jangka waktu yang dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya.

Pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya lurah mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat ini, pemerintah kelurahan dibantu oleh suatu lembaga yang dinamakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yaitu sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah kelurahan yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa program kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan ini meliputi: (a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan; (b) pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; (c) pengelolaan kegiatan lembaga

kemasyarakatan; (d) pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan/atau penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam rangka menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Penelitian ini fokus pada topik penelitian bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan Cijawura Kota Bandung. pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat serta mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, dan dapat menjadi penggerak untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan kesehatan. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan ini pemerintah kelurahan Cijawura dibantu oleh LPM dalam menjalankan kegiatannya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui peran kelurahan Cijawura dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Menurut (Soekanto, 2002), peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai maka ia menjalankan suatu peran. Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001: 242) terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a) Peran aktif, yaitu suatu peran yang diberikan oleh anggota kelompok dan dapat dikatakan sebagai seorang pengurus atau pejabat.
- b) Peran partisipasi, yaitu suatu peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang bermanfaat untuk kelompoknya.
- c) Peran pasif, yaitu suatu anggota kelompok menahan diri agar diberikan kesempatan kepada fungsi lain dalam kelompok sehingga dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai peran, maka dapat peneliti simpulkan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah suatu perbuatan yang membatasi seorang individu ataupun organisasi untuk melakukan suatu kegiatan yang berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati agar dapat dilakukan.

Dengan demikian hal tersebut dapat diterapkan fungsi peran kepada pemerintah kelurahan, di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kelurahan adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah yang berada dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui camat. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa kegiatan pemerintah kelurahan mempunyai fungsi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat salah satu di antaranya adalah pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan) karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Menurut (Sumaryadi, 2005) pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suatu keadaan sosial yang berkelanjutan. Sehingga dapat kita gambarkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh kekuasaan yang mana dalam hal ini pemerintah kelurahan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

3. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pada dasarnya sebuah kegiatan tidak dapat dilakukan dengan instan dan langsung kepada apa yang menjadi inti dari sebuah hal. Akan tetapi diperlukan tahapan sebagai suatu pijakan ketika hendak melaksanakan sebuah kegiatan. Dalam pemberdayaan masyarakat juga memiliki tahapan-tahapan untuk dilakukan sebelumnya. Menurut (Soekanto, 1987) pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan

Pada tahapan ini terdapat 2 (dua) hal yang harus dilakukan yaitu menyiapkan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat yang kompeten di bidangnya dan

menyiapkan lapangan yang pada dasarnya suatu usaha yang dilakukan secara non-direktif.

2. Tahapan pengkajian “*Assessment*”

Tahapan ini bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dirasa akan dibutuhkan oleh petugas saat hendak melakukan pemberdayaan pada suatu masyarakat.

3. Tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan

Pada tahap ini banyak hal yang harus dipikirkan untuk menyusun rencana dalam mencapai pemberdayaan yang berdaya guna di masyarakat.

4. Tahapan pemformalisasi rencana aksi

Tahap ini membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

5. Tahapan pelaksanaan “implementasi” program atau kegiatan

Pada tahap ini peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.

6. Tahapan evaluasi

Pada tahap ini proses pengawasan dari warga dan petugas program dilakukan dengan melibatkan warga

7. Tahapan terminasi

Pada tahap ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran.

4. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip utama yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian dan berkelanjutan (Najiati & Sri, 2005) (Najiati, dkk (2005: 54)). Adapun penjelasan dari keempat prinsip tersebut adalah prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip keswadayaan dan kemandirian, dan prinsip keberlanjutan (Riadi, 2017).

5. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Mardikanto, 2014) menyebutkan ada 6 (enam) tujuan dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu: (1) perbaikan kelembagaan “*better*

institation” (2) perbaikan usaha “*better bussiness*” (3) perbaikan pendapatan “*better income*” (4) perbaikan lingkungan “*better environment*” (5) perbaikan kehidupan “*better living*” (6) perbaikan masyarakat “*better community*”

Metode

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ini menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, serta menerjemahkan pada kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2017). Adapun teknik dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan wawancara untuk menentukan informan yang akan diwawancarai tersebut menggunakan metode *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwasanya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan kelurahan Cijawura ini sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat tahapan – tahapan yang telah dilakukan oleh kelurahan

Pada tahapan persiapan, ada dua hal yang harus dikerjakan yaitu menyiapkan petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya dan menyiapkan lapangan yang pada dasarnya suatu usaha yang dilakukan secara non-direktif. Pada tahap ini pemerintah kelurahan melakukan persiapan dengan mempersiapkan para kader untuk membantu program yang akan dilaksanakan. Peran pemerintah kelurahan ini yaitu menyiapkan petugas yang berkompeten di bidang kesehatan yang nantinya dapat melakukan tugas pemberdayaan kepada masyarakat di dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah kelurahan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan dalam melakukan program-program yang akan dijalankannya, terutama di dalam bidang kesehatan.

Pada bidang kesehatan ini pemerintah kelurahan menyiapkan petugas yang siap membantu dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat ini, pemerintah kelurahan dibantu oleh lembaga pemberdayaan masyarakat dan PKK. Selain menyiapkan petugas untuk pelaksanaan, pemerintah kelurahan juga mempersiapkan lapangan atau tempat yang akan dijadikan

sasaran dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ini. Lokus dari pemberdayaan ini yaitu di setiap wilayah RT dan RW yang ada di kelurahan Cijawura.

Selanjutnya pemerintah kelurahan melakukan tahapan pengkajian “*assessment*” di mana pemerintah kelurahan yang dibantu oleh para kader yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan pengumpulan data serta informasi yang diperlukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ini. Dalam tahap pengkajian ini, pemerintah kelurahan dan para kader kesehatan melakukan identifikasi permasalahan yang sedang terjadi di wilayah kelurahan Cijawura yang dalam hal ini terkait dengan kesehatan masyarakat. Selain itu pemerintah kelurahan juga mengumpulkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Pada tahapan alternatif program atau kegiatan, pemerintah kelurahan dan juga kader yang telah dipersiapkan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ini harus melibatkan masyarakat untuk bertukar pikiran. Keterlibatan masyarakat dirasa sangat penting, karena yang mengetahui kondisi masyarakat itu ialah masyarakatnya sendiri. Dalam tahap alternatif program/kegiatan ini, pemerintah dan juga masyarakat bersama-sama menyusun program yang tepat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Memilih alternatif program yang sesuai dengan keadaan saat ini yang terjadi di masyarakat.

Selanjutnya pemerintah kelurahan melakukan tahapan pemformalisasi rencana aksi. Pemerintah kelurahan dibantu oleh para kader untuk menyusun program-program yang akan dilakukan di dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ini. Selain itu para kader juga membantu untuk menyusun proposal kepada donator yang akan membantu dalam hal keuangan untuk keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat ini. Program yang telah disusun tersebut di antaranya program posyandu, penyemprotan disinfektan, pembuatan *hand sanitizer*, sosialisasi 3M, gizi seimbang kepada balita.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan “implementasi” program atau kegiatan. Ini merupakan tahapan yang sangat penting karena tahapan ini merupakan wujud pelaksanaan dari sebuah program terhadap masyarakat. Kader yang telah dipersiapkan langsung turun ke lapangan untuk menjalankan program atau kegiatan yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya. Dalam tahap ini para kader membantu peran kelurahan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Kader yang telah dipersiapkan tersebut harus bisa menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Program-program yang telah dibuat sebelumnya yaitu program posyandu, penyemprotan disinfektan, pembuatan *hand sanitizer*, sosialisasi 3M, gizi seimbang kepada balita telah dilaksanakan sesuai dengan target dari masing-masing program tersebut.

Selanjutnya adalah tahapan evaluasi yang di mana pada tahap ini pemerintah kelurahan dan juga lembaga kemasyarakatan melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian evaluasi dilakukan terhadap semua program yang sudah dijalankan. Evaluasi ini dilakukan setiap bulannya untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam melakukan program selanjutnya. Dalam program-program yang telah dilaksanakan yaitu program posyandu, penyemprotan disinfektan, pembuatan *hand sanitizer*, sosialisasi 3M, gizi seimbang kepada balita namun hal ini masih ada hambatan dalam pelaksanaannya.

Pada program posyandu dan gizi seimbang kepada balita, masih ada target yang belum tercapai. Dalam tahap evaluasi ini, para kader melakukan evaluasi untuk program tersebut yang mana dalam periode selanjutnya target dari balita tersebut harus tercapai dan semua balita harus mendapatkan gizi yang seimbang dengan memberikan vitamin kepada balita. Di samping itu, para kader juga melakukan kunjungan ke setiap rumah yang memiliki balita untuk melakukan sosialisasi/penyuluhan terkait program tersebut.

Tahap terakhir yaitu tahap terminasi, pada tahap ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Peran kader dapat dikatakan selesai dalam membantu pemerintah kelurahan apabila keseluruhan program telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang baik. Pelaksanaan program kesehatan di kelurahan Cijawura ini memberikan hasil yang baik yang mana masyarakat lebih menyadari untuk pola hidup sehat dan bersih.

Kesimpulan

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Cijawura telah melalui proses tahapan – tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, di antaranya adalah tahapan persiapan, tahapan pengkajian “*Assesment*”, tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahapan formalisasi rencana aksi,

tahap pelaksanaan “implementasi” program atau kegiatan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di kelurahan Cijawura telah memunculkan semangat dari para kader yang bertugas untuk melakukan program pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya program tersebut telah menciptakan kerjasama yang baik antara pemerintah kelurahan dan para kader, yang kemudian dapat menciptakan kemampuan mengelola sumber daya dan menjalin hubungan antar sesama.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Allah Swt atas segala limpahan nikmat dan karunianya, dan terimakasih kepada kedua orang tua kami yang telah berperan dalam memberikan semangat, doa dan dukungan yang tiada henti, serta terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan nasehat serta bimbingannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Rujukan

Buku

- Abdullah, M., & Soekanto, S. (1987). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Pustaka Pelajar (ed.); Edisi Keem). Pustaka Pelajar.
- Mardikanto, T. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Alfabeta.
- Najiati, & Sri. (2005). Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. In *Wetlands International*.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sumaryadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV Citra Utama.

Jurnal

Haryanto, R. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perkawinan Adat Jawa. *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2, 37-62.

Sugiarso, Riyadi, A., & Rusmadi. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Tanah Pekarangan (PTP) untuk Konservasi dan Wirausaha Agribisnis di Kelurahan Kedung Pane Kota Semarang. *DIMAS*, 17, 343-366.

Website

Riadi, M. (2017). *Tujuan, Prinsip dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat*.
<https://www.kajianpustaka.com/2017/11/tujuan-prinsip-dan-tahapan-pemberdayaan-masyarakat.html>

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan